****

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(KAK)**

**KEGIATAN PENGKAJIAN USULAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**2019**

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**PROGRAM** : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

**KEGIATAN** : Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota

**ANGGARAN 2019** : Rp. 250.000.000,-

**UNIT KERJA** : Biro Administrasi Pembangunan Daerah

1. **Latar Belakang**
2. **Dasar Hukum**
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 tanggal 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017.
7. **Gambaran Umum**

Adanya pembagian kewenangan setiap tingkatan pemerintahan, menuntut daerah peka dan responsif terhadap kepentingan sinergi pembangunan. Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus dilakukan agar terjadi sinergi dalam pelaksanaan program yang direncanakan, sehingga tujuan dan target pembangunan dapat terwujud secara optimal.

Sinergi pembangunan idealnya tergambar dalam dokumen perencanaan. Adanya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan, maka komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bisa langsung disepakati  dan tertuang dalam dokumen perencanaan/rencana aksi yang disesuikan dengan sumberdaya yang ada.

Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah adalah rendahnya keterkaitan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian.   biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi produk.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah perlu difokuskan dan disinergitaskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah

**II**. **Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud :**

Untuk mengetahui sejauhmana usulan proposal yang diajukan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi lapangan, kebutuhan anggaran, rencana pelaksanaan dan kewenangan lokasi yang diusulkan.

1. **Tujuan :**
* Untuk mengetahui kelayakan usulan proposal yang diajukan oleh Kabupaten/Kota.
* Untuk mengetahui kebutuhan biaya yang diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.
1. **Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatanyang diajukan sesuai dengan usulan proposal yang diajukan Biro Administrasi Pembangunan Daerah di 35 Kab/Kota se Jateng.

1. **Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan pengkajian usulan sinergitas pembangunan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan cara :

1. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dengan mengundang SKPD Provinsi terkait dan Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan proposal.

1. Kajian Lapangan

Dilakukan dengan cara observasi lapangan pada lokasi yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.

1. Laporan Tertulis

Hasil rapat koordinasi dan atau kajian lapangan dilaporkan kepada pimpinan sesuai dengan kondisi yang ada.

1. **Keluaran/Output**
2. Rapat koordinasi usulan proposal 9 kali.
3. Kajian lapangan 46 kali.
4. Laporan tertulis 55 buah.
5. **Sumber Dana**

Sumber Dana untuk membiayai kegiatan Pengendalian yang diajukan melalui Organisasi Perangkat Daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1. **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimulai sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

1. **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| Ja | Pe | Ma | Ap | Me | Jn | Jl | Ag | Se | Ok | No | De |
| 1 | Inventarisasi usulan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Identifikasi usulan |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 3 | Peninjauan lapangan |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 4 | Laporan insidentil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Penyusunan laporan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

1. **Total Biaya**

Total Biaya kegiatan pengkajian usulan sinergitas pembangunan Kabupaten/Kota sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan melalui Organisasi Perangkat Daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan kegiatanPengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota diharapkan dapat memperoleh kegiatan yang benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan infrastruktur.

**KEPALA BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAERAH**

**Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641024 199203 1 009